

Pentingnya Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda Untuk Meningkatkan Partisipasi Terhadap Pemilihan Umum Dalam Membangun Demokrasi

Kadek Radhitya Vidianditha^{a,1*}

¹ Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja

¹ Dithabasuki@gmail.com

ABSTRAK

Pelaksanaan Pendidikan politik yang dilakukan sudah lumayan menunjukkan sedikit perkembangan yang dimana dengan adanya pendidikan politik dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan bagi generasi muda itu meningkat, dilihat dari statistik di tahun 2019 jumlah partisipasi generasi muda itu meningkat sejumlah 0,23 persen dari tahun 2018. Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu ialah: Status sosial dan ekonomi, Situasi, dan Afiliasi Politik Orang Tua. Oleh karena itu segala praktik penyelenggaraan kekuasaan negara haruslah berdasarkan pada hakekat rakyat. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang kedaulatannya berada di tangan rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam penyelenggaraan kehidupan negara yang berdemokrasi sudah menjadi konsekuensi atas jaminan kebebasan, keadilan, dan kesetaraan di dalam masyarakat dalam segala bidang. Di dalam demokrasi itu sendiri, terdapat nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang senantiasa dijunjung tinggi dan harus dijalankan oleh setiap warganegara. Sebagai wujud real pengakuan negara terhadap kedaulatan rakyat ialah dengan melibatkan atau mengikutsertakan waraga negara Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam menentukan kebijakan politik. Oleh karena itu segala praktik penyelenggaraan kekuasaan negara haruslah berdasarkan pada hakekat rakyat. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang kedaulatannya berada di tangan rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam penyelenggaraan kehidupan negara yang berdemokrasi sudah menjadi konsekuensi atas jaminan kebebasan, keadilan, dan kesetaraan di dalam masyarakat dalam segala bidang. Di dalam demokrasi itu sendiri, terdapat nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang senantiasa dijunjung tinggi dan harus dijalankan oleh setiap warganegara. Sebagai wujud real pengakuan negara terhadap kedaulatan rakyat ialah dengan melibatkan atau mengikutsertakan waraga negara Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam menentukan kebijakan politik.

Kata kunci : Pendidikan, Politik, Generasi Muda, Partisipasi, Demokrasi.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara demokrasi. Oleh karena itu segala praktik penyelenggaraan kekuasaan negara haruslah berdasarkan pada hakekat

rakyat. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang kedaulatannya berada di tangan rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam penyelenggaraan kehidupan negara yang berdemokrasi sudah menjadi konsekuensi atas jaminan kebebasan, keadilan, dan

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

kesetaraan di dalam masyarakat dalam segala bidang. Di dalam demokrasi itu sendiri, terdapat nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang senantiasa dijunjung tinggi dan harus dijalankan oleh setiap warganegara. Sebagai wujud real pengakuan negara terhadap kedaulatan rakyat ialah dengan melibatkan atau mengikutsertakan warga negara Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam menentukan kebijakan politik.

Dalam konstitusi negara Republik Indonesia terdapat beberapa ketentuan yang menjadi Landasan yuridis pengakuan negara bagi pelaksanaan partisipasi politik warga negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen jaminan terhadap pelaksanaan partisipasi politik warganegara termuat dalam Pasal 22 e tentang pelaksanaan pemilihan umum, Pasal 28 tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pendapat. Pasal 28 d tentang kesempatan yang sama bagi warga negara dalam pemerintahan serta pasal-pasal lainnya. Selain itu terdapat juga ketentuan undang-undang mengenai jaminan pelaksanaan partisipasi politik seperti termuat dalam (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 ICCPR) tentang Jaminan dan Perlindungan Negara Terhadap hak-hak sipil dan politik warga negara, seperti hak menyampaikan pendapat, hak berserikat, hak memilih dan dipilih, hak yang sama dihadapan hukum dan pemerintah serta hak mendapatkan keadilan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan

adil (LUBERJURDIL). Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif anggota DPR, DPRD, dan DPD serta Undang-Undang

Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.¹

Pemilihan umum merupakan salah satu bagian penting dalam proses berdemokrasi dan sekaligus menjadi muara akhir dari adanya sebuah sistem demokrasi. Dalam hal ini rakyat diberikan fasilitas untuk menjadi bagian dari proses penyelenggaraan negara. Namun, dalam beberapa proses penyelenggaraab pemilu di Indonesia tingkat antusiasme rakyat untuk menjadi bagian dari acara tahunan ini belum sepenuhnya digunakan dengan bijak dan tidak sedikit mereka justru enggan untuk ikut berpartisipasi. Dilansir dari CNN Indonesia, partisipasi pemilih pilkada tahun 2018 belum mencapai target. Dalam halaman ini dijelaskan bahwa partisipasi pemilih pilkada 2018 di 171 daerah sebesar 73,24 persen. Jumlah tersebut belum mencapai target sebagaimana ditetapkan oleh KPU sebesar 77,5 persen.²

Dengan demikian mengindikasikan bahwa saat ini di era pasca reformasi sebagian besar rakyat Indonesia belum sepenuhnya memahami pentingnya partisipasi rakyat dalam pemilu. Untuk mencapai tingkat kesadaran yang demikian, masyarakat perlu memahami hekekat dan arti penting sebuah partisipasi. Dalam praktik demokrasi,

¹ Alex Victor Wanna, 2015, *Pentingnya Pendidikan Politik Generasi Muda Terhadap Pelaksanaan Partisipasi Politik di Distrik Samofa kabupaten Biak Numfor*, Jurnal Politico, Volume 4, Nomor 1, hlm 2.

² Bimo Wiwoho, 2018, *Partisipasi Pemilih Pilkada 2018 Belum Mencapai Target*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180630040655-32-310334/partisipasipemilih-pilkada-2018-belum-mencapai-target>, diakses tanggal 02 September 2019.

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

partisipasi politik menjadi bagian penting yang dilakukan oleh sekelompok orang atau individu yang secara aktif ikut memilih pemimpin negara, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Adapun salah satu golongan yang perlu menjadi perhatian dalam angka partisipasi ini adalah para pemilih muda. Para pemilih muda ini rentan digerakkan dan diintervensi oleh kelompok yang berkepentingan untuk mencapai tujuan politik mereka. Padahal pemilih muda ini menjadi bagian awal bagi mereka untuk mengenal kehidupan berdemokrasi dalam menyalurkan pilihannya. Tingkat penasaran dan antusiasme dalam kelompok ini cenderung tinggi dan menjadi momentum mereka sebagai bagian dari penyelenggaraan negara yang berdemokrasi. Pemuda merupakan warga negara Indonesia yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan dari usia 16 tahun sampai dengan 30 tahun. Dalam hal ini, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah pendidikan politik dan demokrasi yang cenderung masih rendah di kalangan pemilih muda. Sebagaimana dimaksud dalam UU No. 2 Tahun 2008 Pasal 31 tentang fungsi partai politik yang salah satu fungsinya adalah memerikan pendidikan politik. Pendidikan politik dan demokrasi bagi generasi muda menjadi pokok penting dalam membangun pondasi setiap individu untuk menciptakan kesan pertama yang baik dalam proses pemilihan umum. Pendidikan politik menjadi penting karena memiliki fungsi meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

dan bernegara; meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun kesatuan dan persatuan dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan negara.³

Dalam hal ini para pemilih muda menjadi bagian awal dalam mempersiapkan pemilih yang cerdas dan mampu memahami hak dan kewajibannya dalam kehidupan negara demokrasi. Untuk menunjang dan mempersiapkan terpilihnya penyelenggara negara yang baik dan untuk memberikan ruang bagi para generasi muda dalam memaksimalkan perannya dalam proses pemilihan umum, maka salah satu cara yang dapat dilakukan dan menjadi perhatian adalah pemberian pendidikan politik dan demokrasi bagi para pemuda. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengambil judul “Pentingnya Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda Terhadap Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum Untuk Membangun Demokrasi”.

Rumusan masalah:

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membuat beberapa permasalahan yaitu:

1. Peran Apa Saja Yang Menjadi Sarana Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda?
2. Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu?

³ Rohmat, Amarru Muftie Holish, Iqbal Syariefudin, 2018, *Pengaruh Pendidikan Politik dan Demokrasi Bagi Generasi Muda Terhadap Tingkat Partisipasi*

Pelaksanaan Pemilihan Umum, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 4, Nomor 3.

PEMBAHASAN

Peran Yang Menjadi Sarana Pelaksanaan Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda

1. Peran Keluarga

Pengaruh sebuah sosialisasi pada keluarga baik yang langsung maupun yang tidak langsung yang merupakan struktur sosialisasi pertama yang dialami seseorang-sangat kuat dan kekal. Yang paling jelas pengaruh dari keluarga ini adalah dalam pembentukan sikap terhadap wewenang kekuasaan (*authority*). keluarga biasanya membuat keputusan bersama, dan bagi si anak keputusan yang dibuat itu bisa otoritatif, dalam arti keengganan untuk mematuhi dapat mengundang hukuman. pengalaman berpartisipasi dalam pembuatan keputusan keluarga dapat meningkatkan perasaan kompetensi si anak, memberinya kecakapan-kecakapan untuk melakukan interaksi politik, serta membuatnya lebih mungkin berpartisipasi dengan aktif dalam sistem politik sesudah menjadi dewasa. Keluarga juga membentuk sikap-sikap politik masa depan dengan menempatkan individu di dalam dunia kemasyarakatan. Tidak sedikit anak muda yang mengatakan bahwa mereka sering berdiskusi dilingkungan keluarga terkait hal-hal mengenai politik, tetapi berdiskusi dilingkungan keluarga pun belum menjamin dapat memberi pemahaman tentang politik secara luas dan mendalam.⁴

2. Peran Pergaulan

Selain peran keluarga, peran agen pelaksana pendidikan politik juga amat penting bagi pengetahuan anak muda dalam mengikuti perkembangan politik. Sekolah memberi pengetahuan kepada kaum muda tentang dunia politik dan peranan mereka didalamnya. Sekolah memberi pandangan yang lebih kongkrit tentang lembaga lembaga politik dan hubungan-hubungan politik. Sekolah juga merupakan “saluran pewarisan” nilai-nilai dan sikap-sikap masyarakat. sekolah dapat memegang peran penting dalam pembentukan sikap-sikap terhadap “aturan permainan politik” (*rule of the political game*) yang tak tertulis, sekolah dapat mempertebal kesetiaan terhadap sistem politik dan memberikan simbol-simbol umum untuk menunjukkan tanggapan yang ekspresif terhadap sistem itu, seperti bendera nasional, dan ikrar kesetiaan “Padamu Negeri”. Pengajaran sejarah nasional juga berfungsi memperkuat kesetiaan kepada sistem politik.⁵ Biasanya, pada masa sekolah, terdapat kelompok-kelompok, baik kelompok persahabatan dan atau kelompok untuk bermain, belajar atau sekedar berbincang-bincang santai. Setiap individu dalam kelompok itu menyesuaikan pendapatnya dengan teman temannya mungkin karena ia menyukai atau menghormati mereka, atau mungkin pula karena ia ingin sama dengan mereka. Jadi kelompok pergaulan itu mensosialisasikan anggota-anggotanya dengan cara mendorong atau mendesak mereka untuk menyesuaikan diri terhadap sikap-sikap atau tingkah laku yang dianut oleh kelompok itu.

⁴ Naning Ramdlang, 1982, *Pendidikan Politik dan Regenerasi*, Liberty Jakarta.

⁵ Ibid

Seseorang mungkin menjadi tertarik pada politik, atau mulai mengikuti peristiwa-peristiwa politik karena teman-temannya berbuat begitu. Seseorang anak lulusan sekolah menengah mungkin memilih masuk ke suatu perguruan tinggi karena pelajar-pelajar lain temannya berbuat serupa. Dalam hal-hal ini individu tersebut merubah kepentingan dan tingkahlakunya agar sesuai dengan kelompoknya sebagai usaha agar ia tetap diterima oleh anggota-anggota kelompok itu. Banyak anak muda yang mengakui bahwa peran agen pergaulan ini sangat membantu mereka mengetahui tentang politik dan dapat membuat mereka untuk mampu berpikir logis disetiap mereka melakukan interaksi mengenai politik.

3. Peran Media Masa

Masyarakat modern tidak dapat hidup tanpa komunikasi yang luas, cepat, dan secara umum seragam. Informasi tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi dimana saja di dunia segera menjadi pengetahuan umum dalam beberapa jam saja. Sebagian besar masyarakat dunia terutama bagian-bagiannya yang modern telah menjadi satu kelompok penonton yang tunggal, yang tergerak hatinya oleh peristiwa-peristiwa yang sama dan dirangsang oleh selera yang sama. Kita tahu bahwa media massa, surat kabar, radio, televisi, majalah memegang peran penting dalam menularkan sikap-sikap dan nilai-nilai modern kepada bangsa-bangsa baru merdeka.⁶ Disamping memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa politik, media massa juga menyampaikan, langsung maupun tidak, nilai-nilai utama yang dianut oleh

masyarakatnya. Beberapa simbol tertentu disampaikan dalam suatu konteks emosional, dan peristiwa-peristiwa yang di gambarkan disekitar simbol itu menjadi warna yang emosional. Dengan demikian, sistem media massa yang terkendali merupakan sarana kuat dalam membentuk keyakinan-keyakinan politik.

Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu

Partisipasi generasi muda dalam praktik politik dan demokrasi merupakan poin penting dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemilihan umum menjadi ajang bagi setiap warga negara untuk menyalurkan haknya dalam bidang politik untuk memilih penyelenggara ini. Namun, fakta empiris menunjukkan bahwa warga negara belum sepenuhnya menggunakan haknya tersebut. Tentu saja hal tersebut didorong oleh beberapa hal, dimana menurut para ahli beberapa faktor yang menyebabkan tingkat partisipasi dalam pemilihan umum, antara lain:⁷

a) Status sosial dan ekonomi

Status sosial merupakan kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan, dan pekerjaan. Sedangkan status ekonomi merupakan keadaan seseorang dalam lapisan masyarakat berdasarkan kepemilikan harta kekayaan. Seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik dan demokrasi, akan tetapi juga mempunyai minat terhadap suasana politik dan demokrasi yang terjadi.

⁶ Ibid

⁷ Doni Hendrik, 2010, *Variabel-variabel yang Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi Politik*

Masyarakat dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2008, Jurnal Demokrasi, Vol. IX, No. 2, hlm. 141.

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

- b) Situasi
Situasi politik dan demokrasi dapat juga dipengaruhi oleh keadaan yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung.
- c) Afiliasi politik orang tua
Afiliasi memiliki makna bergabung dalam suatu kelompok. Afiliasi politik dapat dirumuskan sebagai keanggotaan atau kerjasama yang dilakukan setiap individu atau kelompok yang terlibat ke dalam aliran politik tertentu. Afiliasi politik ini dapat mendorong kesadaran dan kedewasaan masyarakat terhadap politik dan kehidupan berdemokrasi untuk menggunakan hak politiknya.
- d) Pengalaman berorganisasi
Organisasi merupakan suatu sistem yang mengatur kehidupan masyarakat. Partisipasi politik dan demokrasi merupakan penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi sebagaimana yang terjadi dalam organisasinya.
- e) Kesadaran politik
Kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warganegara yang hidup dalam negara demokrasi yang memiliki peran penting dalam setiap penyelenggaraan negara.
- f) Kepercayaan terhadap pemerintah
Kepercayaan terhadap pemerintah merupakan penilaian setiap individu kepada kinerja pemerintahan. Masyarakat yang cenderung malas menggunakan hak pilihnya dapat disebabkan karena sudah berkurangnya rasa kepercayaan itu.
- g) Perangsang partisipasi melalui sosialisasi di media massa dan lainnya.

PENUTUP

Simpulan

1. Pelaksanaan Pendidikan politik yang dilakukan sudah lumayan menunjukkan sedikit perkembangan yang dimana dengan adanya pendidikan politik dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan bagi pelaksanaan partisipasi politik generasi muda itu meningkat, dilihat dari statistik di tahun 2019 jumlah partisipasi generasi muda itu meningkat sejumlah 0,23 persen dari tahun 2018.
2. Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu ialah: Status sosial dan ekonomi, Situasi, dan Afiliasi Politik Orang Tua.

DAFTAR PUSTAKA

- Naning Ramdlang.1982, *Pendidikan Politik dan Regenerasi*, Liberty Jakarta.
- Alex Victor Wanna, 2015, *Pentingnya Pendidikan Politik Generasi Muda Terhadap Pelaksanaan Partisipasi Politik di Distrik Samofa kabupaten Biak Numfor*, Jurnal Politico, Volume 4, Nomor 1.
- Bimo Wiwoho, 2018, *Partisipasi Pemilih Pilkada 2018 Belum Mencapai Target*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180630040655-32-310334/partisipasispemilih-pilkada-2018-belum-mencapai-target>, diakses tanggal 02 September, pukul 22.30.
- Rohmat, Amarru Muftie Holish, Iqbal Syariefudin, 2018, *Pengaruh Pendidikan Politik dan Demokrasi Bagi Generasi Muda Terhadap Tingkat Partisipasi Pelaksanaan Pemilihan Umum*, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 4, Nomor 3.

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
Singaraja, 5 Oktober 2019

Doni Hendrik, 2010, *Variabel-variabel yang Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2008*, Jurnal Demokrasi, Vol. IX, No. 2.